

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014. Jakarta: Bappenas
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003. Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan. Direktorat Pembangunan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputy Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional. Jakarta: Bappenas
- Budianta, A. 2010. Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah Di Indonesia.
- Brahmoto, Omar.2013. Arahana dan Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaaan dengan Pendekatan Agropolitan di Kabupaten Blitar. Disertasi. Bogor:IPB.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2005. Deskripsi Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar. Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum
- Distrik Sota Dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke.
- Farizi, Hafiz. 2012. Arahana Pengembangan Agropolitan Berbasis Komoditas Hortikultura di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur.
- Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah dan Negara Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011-2025.
- Hadi, Suprayoga. 2009. Program Pembangunan Kawasan Perbatasan. Buletin Penataan Ruang Edisi Mei-Juni.
- Hardiansyah. 2006. Karakteristik Kawasan Perbatasan Entikong.

Hadi, S. Bappenas. Pengembangan Kerjasama Ekonomi Regional Dan Peningkatan Kinerja Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

Hadi, S. Bappenas. Program Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Husnadi, 2006. Menuju Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Daratan Antar Negara (Studi Kasus: Kecamatan Poloh dan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat).

Kabupaten Merauke Dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke.

Kajian Pengembangan Investasi Wilayah Perbatasan Tahun 2011.

Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. Partnership Policy Paper No. 2/ 2011.

Kurniadi, D. 2009. Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Manik, T. 2013. Kajian Pengembangan Kawasan Agropolitan Seroja Kabupaten Lumajang.

Master Plan Percepatan Pembangunan dan Perluasan MP3EI Tahun 2011-2025.

Nainggolan, P. Masalah Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea: Perspektif Keamanan.

Pedoman Pengelolaan Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional dan Daerah (Agropolitan) Tahun 2001.

Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. Staf Ahli Meneg PPN Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Dan Kawasan Tertinggal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Perkembangan Lintas Batas Tradisional Pada Pos Imigrasi Perbatasan Distrik Sota Tahun 2010-2013

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Merauke. Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke.

Profil Kampung-Kampung Perbatasan Serta Peran, Fungsi, Tanggung Jawab dan Kewenangan Badan Kerjasama Wilayah Perbatasan di Kabupaten Merauke.

Reinhold R Y, Haryanto R, dan Ma'rif S. 2008. Kajian Faktor Pendorong Pengembangan Kawasan Perbatasan Jayapura, Indonesia – Vanimo.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2010-2030. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua

Rumford, C. 2006. 'Borders and bordering', in G. Delanty (ed.) Europe and Asia Beyond East and West: Towards a New Cosmopolitanism. London: Routledge.

Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Papua

Rustiadi, Ernan. 2009. Penataan Ruang Kawasan Perdesaan sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan. Buletin Penataan Ruang Edisi juli-Agustus.

Sugiyono. (2009). STATISTIKA untuk PENELITIAN. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Surat Keputusan Menteri Pertanian No 837/KPTS/MU/1980. Kriteria dan Tata Cara Penetapan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Soenarno. 2003. Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah. Seminar Nasional Agroindustri dan Pengembangan Wilayah. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia. Jakarta, Februari 2003.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008. Tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Van Well,L. 2006. Cross-Border Typologies in the Enlargement Area. Results from the ESPON 1.1.3 Report. Enlargement of the European Union and its Polycentric Spatial Structure. Royal Institute of Technology

Wu,C.T. 2001. Cross Border Development in a Changing World: Redefining Regional Development Policies. In Edgington, D.W., Fernandez, A. L. and Hoshino, C.(eds). New Regional Development Paradigm. Vol. 2. London: Greenwood Press.